



Buletin Parlementaria

Nomor 1197/I/V/2022 • Mei 2022



Komisi IX Minta Pemerintah Segera Manfaatkan BLK Pekanbaru



3 UU TPKS Hadiah
di Hari Kartini
Bagi Perempuan
Indonesia



4 Presiden Larang Ekspor
Migor dan CPO, Gus
Muhaimin: Pengusaha
Harus Tunduk



9 772614 339005



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar bertukar cenderamata usai memimpin Komisi IX DPR RI meninjau BLK Pekanbaru. Foto: Jaka/nvi

Komisi IX Minta Pemerintah Segera Manfaatkan BLK Pekanbaru

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) segera memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) Pekanbaru. Pasalnya, sudah ada peralihan pengelolaan dari Pemerintah Provinsi Riau ke pemerintah pusat, tinggal menunggu terbitnya Susunan Organisasi Tata Kerja (STOK).

“Saya pada prinsipnya akan mendukung apapun untuk perkembangan BLK Pekanbaru dan berharap BLK ini ke depan bisa

menjadi contoh untuk yang lain. Untuk itu saya meminta agar Kemenaker bisa segera merenovasi dan memanfaatkan BLK ini, sayang kalau tidak dimanfaatkan oleh anak-anak muda di sini, jangan sampai setop,” ujar Ansory saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi IX DPR meninjau BLK Pekanbaru di Riau, Selasa (19/4).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, BLK Pekanbaru ini bisa dikembangkan seperti BLK di Jakarta, Bandung, Serang, dan Semarang yang levelnya sudah internasional. “Nanti kita bicarakan dengan Bu Menteri (Ketenagakerjaan),

apapun yang ingin dibangun atau dialokasikan untuk apa dianggarkan saja, nanti bisa buat surat ke Komisi IX. Karena BLK ini sayang sekali butuh renovasi dan peremajaan alat, malahan kalah dengan yayasan swasta di daerah sini yang bisa menelurkan milenial yang handal,” pungkas Ansory.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Imron Rosyadi mengatakan, pihaknya telah mengalihkan pengelolaan BLK Pekanbaru dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, dimana pelatihan strategis itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenaker. Terlebih, saat ini yang dibutuhkan pasar itu hampir semuanya pelatihan strategis yang tidak mungkin dilaksanakan oleh Pemprov.

“Oleh karena itulah kami berinisiatif berdasarkan kebijakan dan keputusan pak gubernur agar diperjuangkan BLK Provinsi Riau di Pekanbaru dan Dumai itu dialihkan pengelolaannya ke Kemenaker. Alhamdulillah BLK Pekanbaru sudah resmi menjadi milik pusat, tinggal SOTK nya segera dipercepat di Kemenpan RB. Selain itu juga kendala di SDM dan anggaran kami terbatas, kiranya sangat tepat jika dialihkan ke pusat,” terangnya. ■jk/sf

UU TPKS Hadiah di Hari Kartini Bagi Perempuan Indonesia



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/nvl

Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani bersama Anggota DPR RI Diah Pitaloka dan Anggota DPR RI Krisdayanti menerima perwakilan kelompok perempuan. Dalam acara ini, kelompok-kelompok perempuan mengucapkan rasa terima kasih terhadap disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta meminta dan mendukung pengimplementasiannya.

Puan pun menilai UU TPKS merupakan hadiah di Hari Kartini bagi para perempuan Indonesia yang telah diperjuangkan bersama-sama. Saat bertemu dengan berbagai elemen masyarakat itu, ia melihat banyaknya dukungan yang kemudian meminta

agar implementasi UU TPKS ini dapat berjalan menjadi cita-cita bersama.

“(UU TPKS) ini adalah hadiah di hari kartini bagi perempuan Indonesia, anak Indonesia, agar kedepan itu jangan sampai terjadi ada korban kekerasan, namun bagaimana kita mencegah, memitigasi, sehingga undang-undang TPKS memang bisa bermanfaat dalam melindungi dan menjaga serta mencegah jangan sampai ada kekerasan seksual untuk perempuan dari anak khususnya,” ujar Puan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4).

Mantan Menko PMK ini pun mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan dari semua elemen bangsa dalam bergotongroyong UU TPKS bisa segera disahkan. “Nantinya itu (dukungan masyarakat) saya harapkan juga bisa dilakukan dalam pembahasan undang-undang yang lain, sehingga nantinya setiap undang-undang yang kemudian disahkan di DPR akan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tuturnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini pun meminta masyarakat untuk tetap mengawal implementasi UU TPKS. “Saya juga meminta kita semua tetap mengawal karena sekarang ada di pemerintah, bahwa aturan-aturan turunan terkait dengan undang-undang TPKS ini bisa segera diselesaikan sehingga implementasi di lapangan itu akan menjadi lebih kuat,” pinta Puan. ■ gal/aha



Komisi IX Minta Pemerintah Segera Manfaatkan BLK Pekanbaru

3 UU TPKS Hadiah di Hari Kartini Perempuan Indonesia
4 Presiden Larang Riset Migor dan CPO, Gus Mufarrihin, Penggataha Harus Tunduk

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Wiryawan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauzail, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irianidi, Surahmat Eko Budi Setiantono, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firista Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitomput, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afidillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M, Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciaini, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Presiden Larang Ekspor Migor dan CPO, Gus Muhaimin: Pengusaha Harus Tunduk



Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar saat memberi sambutan dalam kegiatan 'Silaturahmi Insan Media bersama Gus Muhaimin'. Foto: Munchen/nvl

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng (CPO) mulai Kamis, 28 April 2022 mendatang. Gus Muhaimin pun berharap agar para pengusaha tunduk pada larangan tersebut.

"Larangan ekspor ini menunjukkan negara punya teori dan jalan keluar ekonomi, sehingga pengusaha harus tunduk dan tidak main-main," tegas Gus Muhaimin saat ditemui usai menghadiri kegiatan 'Silaturahmi Insan Media bersama Gus Muhaimin' di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4).

”

LARANGAN EKSPOR INI MENUNJUKKAN NEGARA PUNYA TEORI DAN JALAN KELUAR EKONOMI, SEHINGGA PENGUSAHA HARUS TUNDUK DAN TIDAK MAIN-MAIN

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, larangan ekspor minyak goreng beserta CPO ini memiliki risiko intervensi pasar. Namun lebih lanjut, pengusaha harus meningkatkan kepentingan

dalam negeri sebagaimana keinginan Pemerintah Indonesia.

"Tapi pemerintah tahu, pengusaha CPO sudah banyak untungnya. Itu harus *fair dong*. Pengusaha sudah terlalu banyak tanah yang dipakai jadi sawit, untungnya sudah berlipat-lipat, masa *mikiran* negara *aja nggak mau*," seloroh legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII tersebut.

Di akhir, Gus Muhaimin mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk mendukung kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO, yang sebelumnya sudah resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi dan mulai berlaku Kamis mendatang. "Ayolah kita bangun negara ini dengan membatasi impor. Membatasi impor juga tidak membatasi, ya sudah larangan impor. Ini harus didukung," tutup Gus Muhaimin. ■ **we/sf**



Komisi III Tekankan Penegakan Hukum Guna Pemulihan Ekonomi Nasional dan Daerah

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi III ke Provinsi Gorontalo, guna mengevaluasi capaian kinerja seluruh mitra kerja Komisi III. Soal capaian kinerja penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo



UNTUK POLRI, KAPOLDA GORONTALO INI SUDAH BEKERJA SANGAT LUAR BIASA, DARI LAPORAN SANGAT TERTIB, SANGAT PRESISI, SISTEMATIS, DAN JELAS BETUL PROGRAM YANG DI JALANKAN

pada tahun 2021 hingga triwulan I tahun 2022 ini, Komisi III meminta Penjelasan singkat terkait penanganan kasus-kasus yang menonjol dan menjadi perhatian masyarakat.

Usai memimpin rapat di Aula Titinepo Polda Gorontalo, Gorontalo, Rabu (20/4),

Bambang memberikan apresiasi kepada Polri khususnya Polda Gorontalo dalam mengimplementasikan kebijakan Kapolri yakni Transformasi menuju Polri yang presisi.

“Untuk Polri, Kapolda Gorontalo ini sudah bekerja sangat luar biasa, dari laporan

sangat tertib, sangat presisi, sistematis, dan jelas betul program yang di jalankan, dengan *tagline* untuk Polri Presisi, Presisi dijabarkan di lapangan dengan langkah-langkah yang masif dan terstruktur, jadi bagus,” paparnya.

Dalam rapat dengan Polda Gorontalo, Komisi III juga memberikan perhatian khusus pada persoalan yang berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional dan optimalisasi pendapatan negara dan daerah, seperti tindak pidana di bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, dan kejahatan lainnya.

Saat rapat dengan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo, Bambang juga meminta penjelasan Kapolda terkait dengan strategi dan langkah-langkah Polda Gorontalo dalam rangka penciptaan ketertiban dan keamanan masyarakat, terutama yang terkait dengan upaya pemeliharaan Kamtibmas dan mencegah berbagai potensi gangguan selama bulan Ramadhan dan perayaan Idulfitri 2022, seperti kelangkaan minyak dan bahan pokok, serta gangguan keamanan lainnya.

Bambang juga mengatakan ada beberapa catatan permasalahan yang sudah diinventarisasi yang nantinya akan di bahas di rapat internal Komisi III DPR RI. “Nanti catatan-catatan ini akan kita bawa di dalam rapat internal Komisi III bersama kawan yang kunjungan kerja di Sumatera Selatan dan Riau kemudian itu nanti yang kita *list* sebagai anggota dewan yang akan kita perjuangkan,” jelas Bambang.

Dalam rapat Komisi III DPR RI di Polda Gorontalo tersebut selain Ketua Komisi III, hadir juga sembilan Anggota Komisi III, Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, Kepala BNNP Brigjen Pol. Sukandar, Wakapolda, Irwasda, dan Para Pejabat Utama Polda Gorontalo. Pada pertemuan itu, Kapolda Gorontalo diminta menjelaskan program prioritas Polda Gorontalo tahun 2022 untuk menjadi Polri yang presisi. ■eko/aha



Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto Foto: Eko/nvl

Surplus Energi di PLTMG Holtekamp 50MW Jayapura Harus Dikelola dengan Bijak

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Holtekamp 50 MW merupakan pembangkit milik PT PLN (Persero) yang menjadi salah satu *base load* pada kelistrikan di Jayapura. Dengan beroperasinya PLTMG tersebut, diharapkan masyarakat dapat menikmati energi listrik yang merata hingga ke pelosok daerah serta mendukung pertumbuhan industri di daerah.

Saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PLTMG Holtekamp 50 MW di Jayapura, Papua, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto memperoleh gambaran bahwasanya di sistem Jayapura ini terdapat surplus daya hingga 54MW. Untuk itu ia berpesan agar kelebihan daya tersebut dikelola dengan bijak demi kepentingan masyarakat.

“Kita memperoleh gambaran, dari sisi ketersediaan listrik cukup. Bahkan ada cadangan lebih sekitar 54MW atau 51 persen, itu sudah termasuk tinggi. Hanya memang cadangan itu harus tersebar rata dan tidak di satu tempat saja,” ujar Sugeng usai pertemuan di Jayapura, Papua, Sabtu (23/4).

Politisi Partai NasDem ini mengutarakan bahwasanya ke



AGAR KELEBIHAN DAYA TERSEBUT DIKELOLA DENGAN BIJAK DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT.



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke PLTMG Holtekamp 50 MW di Jayapura, Papua. Foto: Erman/nvl

depan, Papua akan menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia. Pasalnya, cadangan sumber daya alam di Papua sangat banyak. Hal itu perlu ditunjang dengan kemampuan sumber daya manusia yang hebat dan tentu harus di-*support* dengan energi listrik yang memadai.

“Ada potensi energi yang besar dari (sungai) Mamberamo, yakni sebesar 20giga. Memang hari ini belum dibangun, karena *demand* di Papua masih sangat rendah. Nanti seiring dengan kemajuan masyarakat Papua, itu akan kita bangun segera, kita juga akan bangun industri-industri di Papua,” ucap Sugeng.

Kepada **Parlementaria**, Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Adi Priyanto mengakui adanya kelebihan cadangan

daya sekitar 54MW. Menurutnya, cadangan daya (*reserve margin*) tersebut tentu diperuntukkan bagi pembangunan di Jayapura.

“Jadi kami menyediakan *reserve margin* ini selain untuk kehandalan, juga untuk pembangunan. Kami harapkan dengan *reserve margin* yang sedemikian besar ini, masyarakat di Jayapura dan sekitar bisa lebih maju lagi, banyak investor-investor masuk tanpa khawatir kekurangan listrik. Harapan kami ekonomi di Papua akan lebih maju lagi,” pungkasi Adi.

Selain Adi Priyanto, dalam kunjungannya tersebut, Komisi VII DPR RI juga didampingi oleh Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana serta Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. ■ es

Komisi VIII Imbau Penanganan Kenakalan Anak DIY Dilakukan Secara Humanis

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan isu kejahatan jalanan yang banyak melibatkan anak-anak serta remaja yang kembali marak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru-baru ini, turut menjadi perhatian serius Komisi VIII DPR RI. Meski persoalan kenakalan anak tersebut harus ditangani secara serius, namun Komisi VIII DPR RI sebagaimana disampaikan Yandri, mengimbau penanganan kenakalan anak tidak melalui pendekatan hukum melainkan pendekatan secara humanis.

Demikian disampaikan Yandri saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi

VIII DPR RI ke Komplek Kepatihan Yogyakarta, DIY, Senin (18/4). Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi DIY Kadarmanta Baskara Aji, Kepala Kanwil Kemenag DIY, Ketua BAZNAS DIY, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Kepala Dinas Sosial DIY, Kepala DP3AP2 DIY, serta Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol DIY.

“Isu kejahatan jalanan yang banyak melibatkan anak-anak serta remaja tentu menjadi perhatian serius Komisi VIII. Komisi VIII menegaskan persoalan anak tersebut harus ditangani secara serius, namun tidak melalui pendekatan hukum melainkan pendekatan secara humanis.

Di antaranya melalui pembinaan dan pemberdayaan, sehingga tumbuh kembang anak bisa kita pertanggungjawabkan di masa yang akan datang,” jelasnya.

Namun demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menuturkan Komisi VIII DPR RI tetap mengapresiasi langkah taktis Pemerintah Provinsi DIY yang sudah memasuki tahap memperbanyak pusat kreativitas anak sampai tingkat kecamatan atau desa terutama melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang akan ada di tingkat provinsi, atau kota, hingga kelurahan. Dengan tujuan agar DIY yang saat ini masih berstatus pelopor bisa berubah menjadi provinsi ramah anak dan layak anak.

Selain itu, Yandri mengungkapkan pada kunjungan Komisi VIII DPR RI juga tancap gas melaksanakan kewajiban sosialisasi pelaksanaan haji usai Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama baru-baru ini telah ‘ketok palu’ pengambilan keputusan tentang pelaksanaan haji. Sekaligus, dalam momen sosialisasi Komisi VIII juga menyerap aspirasi masyarakat terkait hal-hal pelaksanaan haji pada tahun 2022 ini. Di antaranya berbagai kendala yang kerap dialami masyarakat seperti adanya pembatasan umur. ■

ron/sf



Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat menyalurkan bansos kepada KPM di DIY. Foto: Aaron/nvl

Komisi VIII Pastikan Distribusi Bansos Tepat Sasaran



JADI KALAU GAGAL SALUR MISALNYA MAKA SEGERA DILAPORKAN KARENA BAGAIMANA PUN INI ADALAH UANG YANG SEHARUSNYA DIDAPATKAN OLEH MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menyalurkan bansos di Kaltim. Foto: Nadya/rvi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menyatakan kunjungan kerja (Kunker) reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan pelaksanaan program-program Kementerian Sosial yang meliputi bantuan sosial (bansos) dan sejenisnya, dapat tersalurkan dan tepat sasaran, mengingat di masa pandemi Covid-19 saat ini bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Demikian diungkapkan Ace usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan, serta mitra kerja Komisi VIII DPR RI, dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi keagamaan, penyaluran bantuan

sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta kesiapsiagaan bencana, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (19/4).

“Kementerian Sosial kan banyak programnya, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan santunan non-tunai atau kartu sembako, kemudian bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar yang diberikan kepada Kalimantan Timur. Kami ingin memastikan apakah program tersebut sudah terdistribusi dengan baik termasuk juga apakah sudah tepat sasaran atau tidak ya. Karena program-program tersebut sangat membantu masyarakat yang saat ini memang terdampak secara ekonomi gitu ya akibat dari pandemi Covid 19,” ucap politisi Partai Golkar itu.

Ace juga menambahkan sejauh ini belum ada laporan-laporan yang

cukup signifikan terkait pendistribusian bansos di Kaltim. Sejauh ini menurutnya penyaluran berlangsung cukup lancar, dan diharapkan program-program bantuan tersebut dapat terus terdistribusi dengan baik kepada masyarakat.

Adapun pengawasan yang akan dilakukan dalam memantau pelaksanaan penyaluran bansos, Ace berharap pengawasan juga dapat dilakukan seluruh pihak, termasuk Dinas Sosial Daerah maupun masyarakat umum. Mengingat, peran Kemensos dalam menyalurkan bantuan ini tidak dapat dilakukan seorang diri, butuh keterlibatan seluruh pihak untuk dapat memantau jalannya distribusi bantuan-bantuan tersebut.

“Jika misalnya ya penerimaan bantuan tersebut tidak sesuai dengan seharusnya maka segera melaporkan kepada Kementerian Sosial pusat untuk diperbaharui datanya. Yang kedua jika misalnya anda gagal salur akibat dari tempat orang yang sudah meninggal kemudian datanya tidak tepat dan lain-lain sudah seharusnya itu segera dilaporkan gitu kepada Kemensos pusat dan kementerian sosial sendiri telah menyampaikan kepada kami bahwa mereka punya mekanisme di dalam melakukan verifikasi dan validasi datanya. Jadi kalau gagal salur misalnya maka segera dilaporkan karena bagaimana pun ini adalah uang yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. ■

Komisi VIII Harap Penerima PKH Segera Mencapai Graduasi



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin Tim Kunker Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan sosial dari Kemensos untuk penerima PKH di Batam. Foto: Arief/nv

Graduasi Sejahtera Mandiri merupakan berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat yang dikategorikan mampu. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang ingin mengajak pemerintah, terutama Kementerian Sosial untuk menjadikan Kemensos agar tidak dipandang seolah-olah memelihara orang miskin, karena pada dasarnya semua orang ingin hidup sejahtera.

“Kita berharap adanya graduasi. Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) ada peningkatan dalam kondisi sosial ekonomi, dalam hitungan jika kita bisa menghemat dan ditargetkan dalam satu periode sebanyak satu juta warga maka akan menghemat anggaran sebesar Rp5 triliun,” harap Marwan

usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI bersama Wali Kota Batam menyalurkan bantuan sosial dari Kemensos untuk penerima PKH di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (19/4).

Marwan menilai, Kota Batam merupakan kota impian masyarakat Indonesia dari berbagai tempat karena memang menjanjikan kesejahteraan. Maka pihaknya mendorong di antara penerima PKH di Batam agar ada



PARA PENDAMPING TIDAK HANYA MENGAWASI DAN MENYALURKAN BANTUAN, TETAPI KEJAR HAK MASYARAKAT YANG SEHARUSNYA MENDAPAT BANTUAN

peningkatan menjadi pengusaha produk rumahan seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan modal lewat Himpunan Bank Milik Negara atau (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN).

“Catatan Kemensos, masih ada 19.000 ribu PKH yang ada di Kota Batam. Kita ketemu penerima PKH, mereka bertekad keluar dari PKH tahun depan. Mereka bilang untuk pengajuan modal Rp10 juta sampai Rp20 juta sulit, ini yang akan kita terobos mempertemukan antara Himbara agar ada sentuhan modal bantuan mikro. Dan tugas pendamping harus menemukan orang-orang yang memiliki talenta, ada bibit-bibit kemampuan untuk usaha dengan baik. Itulah rencana kita yang akan kita coba dari Komisi VII DPR RI,” jelas Marwan.

Pada saat penyaluran bantuan sosial berlangsung, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, agar para pendamping tidak hanya mengawasi dan menyalurkan bantuan, tetapi kejar hak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan, kurangnya sasaran berakibat pihak lain yang sudah tidak layak tetapi masih menerima PKH.

“Tentu yang tahu siapa mereka adalah pendamping karena mereka selalu berhadapan pada saat penyaluran. Kita sekarang minta kepada Pusdatin mengenai informasi kependudukan, data terpadu kesejahteraan sosial harus segera diperbaiki, berjenjang mulai dari kelurahan sampai ke pusdatin di Kemensos kalau datanya tidak baik, pembangunan kita tidak valid dan uangnya akan menjadi tidak tepat sasaran dan sia-sia,” tegasnya. ■ afr/sf

Komisi IX Soroti Efisiensi Pelayanan dan Fasilitas RSUD dr. Doris Sylvanus Kalteng

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 dipimpin

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dalam tinjauannya, Felly melihat langsung kondisi sumber daya manusia (SDM), fasilitas, dan pelayanan RSUD.

“Pertama, saya mendengar banyak keluhan dari SDM di dalamnya, maka sebaiknya SDM perlu ditambah lagi ke depannya. Sementara yang kita lihat lainnya, kondisi bangunan inikan merupakan bangunan lama ya, memang lahannya begitu luas, sehingga model bangunannya tersebar. Terus saya berpikir, bagaimana bisa menciptakan pelayanan yang maksimal? Masukan dari saya, perlu dibuat perencanaan pembangunan yang lebih tepat, serta penambahan fasilitas *lift*, sehingga bisa menjadi perhitungan dokter untuk pelayanan kepada pasien,” tutur Felly usai peninjauan RSUD Doris Sylvanus, di Palangka Raya, Kalteng, Senin (18/4). Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI meninjau RSUD dr. Doris Sylvanus, di Palangka Raya, Kalteng. Foto: Dipa/mv

Felly mengatakan penambahan fasilitas ini perlu dipikirkan lebih serius lagi. Melihat rencana RSUD yang akan meningkatkan fokus penanganan pada penyakit jantung, kanker dan stroke untuk jangka panjangnya. “Dari paparan Ibu Direktur, jika fokus perencanaan ingin ditingkatkan lagi, namun melihat fasilitas yang ada, coba kita hitung, berapa menit dokter bisa menangani? Yang terpenting, karena



Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI meninjau RSUD dr. Doris Sylvanus, di Palangka Raya, Kalteng. Foto: Dipa/mv

RSUD ini fokus pada penanganan jantung, ditambah lagi nantinya akan ditingkatkan menjadi RSUD kanker. Maka, perlu dilihat juga bantuan APBN ke depannya, sejauh mana kemampuan daerah sanggup untuk ditingkatkan lagi,” tegas politisi Partai NasDem ini.

Selain terkait dengan rumah sakit, Felly juga mengkhawatirkan permasalahan penyebaran infeksi HIV yang terjadi di Kalteng. Pihaknya meminta pemda dan pusat untuk proaktif menangani masalah ini, termasuk menelusuri sumber penyebarannya sehingga dapat tertangani segera. Paparan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus menyebut telah terjadi 200 lebih kematian karena infeksi HIV. Hal ini perlu dicari sumbernya, apakah berasal dari dalam atau luar negeri. “Daerah Kalimantan kan bisa dibidang tidak dekat dari pusat kota. Dalam hal ini perlu dilakukan koordinasi antara Pemda dan Pusat, serta kedua pihak harus pro aktif.

Kami (Komisi IX) bersama dengan Kementerian Kesehatan selalu fokus dari hulu ke hilir. Ketika terjadi satu kasus, harusnya langsung kita cari sumbernya. Saya takutnya, sudah ada kasus berat, kemudian baru ditangani. Mungkin ini yang membuat kasus HIV di Kalteng meningkat,” analisa Felly.

Felly memastikan pihaknya mendukung adanya penyesuaian-penyesuaian terkait dengan pencapaian standar fasilitas RSUD untuk menjadi lebih baik. “Jadi dari sisi pemenuhan kebutuhan SDM secara global, pendanaan, serta perlu ditambah dari sisi kualitas klaim, sebagai bentuk pelayanan BPJS Kesehatan, yang menjadi mitra dari Komisi IX. Hal ini perlu dilakukan, supaya semuanya dapat bersinergi dalam seluruh tatanan pelayanan Kesehatan. Standar itu bisa tercapai dengan dukungan semua pihak. Tapi pada prinsipnya, RS juga harus siap,” kata legislator daerah pemilihan Sulawesi Utara itu. ■ dip/sf

Komisi IX Dukung Kampung KB di Malut Atasi Stunting

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena menilai bahwa Kampung KB (Keluarga Berkualitas) Fomakudodara di Ternate, Maluku Utara (Malut), selain dapat membantu menangani keluarga berencana juga dapat menangani terjadinya stunting (permasalahan gizi kronis), sehingga mendorong terciptanya keluarga yang sejahtera di daerah Malut.

“Di Kampung KB ini, tepatnya di Kebun DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) adalah sebuah kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengembangkan kampung yang berjumlah 200 lebih di Maluku Utara untuk bisa bersama-sama bersinergi

”

PALING TIDAK SECARA PRAKTIS KAMI MENYISIHKAN SEBAGIAN DARI DANA PERJALANAN DINAS KAMI UNTUK DAPUR DASHAT, INI MERUPAKAN BANTUAN SPONTAN DARI TEMAN-TEMAN ANGGOTA KOMISI IX DPR RI

guna membantu penanganan *stunting*,” kata Melki, sapaan akrabnya usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi

IX DPR RI ke Ternate, Maluku Utara, Senin (18/4).

Politisi Partai Golkar tersebut memastikan, Komisi IX DPR RI mendukung program tersebut untuk didorong semua pihak agar para ibu-ibu sebagai penggerak bisa menghasilkan berbagai macam produk makanan dan minuman yang bisa memberikan kesehatan bagi anak-anak disekitarnya.

“Kami juga akan mendukung melalui program kebijakan dari pusat yaitu melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat, Kementerian Kesehatan dan bersama-sama dengan berbagai pihak terkait lainnya dari sektor swasta, semua akan kita libatkan,” tambah Melki.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI pun turut memberikan bantuan anggaran senilai Rp10 juta yang berasal dari uang perjalanan dinas mereka. “Paling tidak secara praktis kami menyisihkan sebagian dari dana perjalanan dinas kami untuk dapur DASHAT, ini merupakan bantuan spontan dari teman-teman Anggota Komisi IX DPR RI yang hadir,” tutup Melki. ■ cas/sf



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena saat memimpin kunker reses Komisi IX DPR RI ke Kampung KB Fomakudodara. Foto: Chasbi/nvl

Komisi X Pertanyakan Isu Krusial di Bidang Pendidikan di Jawa Barat



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Bandung, Jawa Barat. Foto: Ayu/nvl

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mempertanyakan

beberapa isu krusial bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Di antaranya terkait program 1 juta Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), serta kebijakan kurikulum di Jawa Barat.

Hal itu ia utarakan saat memimpin Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Jabar untuk mengetahui dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan permasalahan atas implementasi kebijakan-kebijakan terkait bidang Komisi X, seperti di bidang Pendidikan. Diantaranya terkait program satu juta Guru PPPK.

“Karena hasil seleksi tahap I dan tahap II di tahun 2021 menyisakan banyak permasalahan, mulai dari administrasi, kualifikasi, formasi sampai pada permasalahan ketidakpastian anggaran gaji guru yang lulus PPPK. Bagaimana dengan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat ini?” tanya Dede Yusuf dalam kunjungan kerja Reses di Bandung, Jabar, Senin (18/4).

Tidak hanya itu, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya, Komisi X DPR RI juga mempertanyakan Kebijakan kurikulum yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pasalnya saat ini satuan pendidikan melaksanakan tiga opsi kurikulum yang ada, yakni

Kurikulum 2013 (Kurtilas), kurikulum darurat dan kurikulum prototipe.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi menjelaskan bahwa sejauh ini program PPPK di Provinsi Jawa Barat tidak ada masalah dan kendala yang berarti. Bahkan untuk Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menerapkan program sertifikasi guru bagi Guru Non-PNS (termasuk PPPK).

Dimana sertifikasi tersebut berimplikasi terhadap kenaikan tunjangan sebesar 1,5 juta yang diperuntukan bagi tambahan guru-guru untuk mengambil perumahan. Tidak hanya itu dukungan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap P3K juga terlihat dari jumlah P3K yang diusulkan termasuk terbanyak atau terbesar se-Indonesia yakni sekitar 16.097.

Tidak kalah penting juga perubahan sistem penganggaran pendidikan di Jawa Barat yang kini menerapkan desentralisasi. Dimana anggaran yang semula terpusat di Provinsi, sekarang diserahkan ke 13 cabang dinas yang ada di Provinsi tersebut. Hal itu semata untuk mengetahui potensi di masing-masing wilayah, sehingga sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dinas Pendidikan Jawa Barat juga menambahkan bahwa ukuran kemajuan sebuah bangsa adalah ekonomi, sumber daya manusia yang unggul, serta reformasi birokrasi. Untuk menciptakan SDM yang unggul, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir memperkuat kurikulum digital.

Pasalnya Pandemi Covid-19 selain telah menghilangkan ratusan pekerjaan, namun juga menciptakan bidang pekerjaan baru, salah satunya di bidang digital dengan *e-commerce* nya. Selain itu Jawa Barat juga memasukan kurikulum anti radikalisme dan terorisme. Bahkan sejak level SD sudah memasukan kurikulum Pancasila melalui berbagai permainan. Tidak hanya itu, Jawa Barat juga mulai memasukan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikannya. ■ **ayu/aha**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa Program

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) diterima dengan baik, namun beberapa catatan-catatan harus diperhatikan dan menjadi evaluasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah baru. Salah satunya kegiatan belajar di luar kampus dan di luar prodi selama 3 semester harus didetailkan sehingga tidak merusak kompetensi utama.

“Kalau 3 semester dikonversi menjadi sks maka akan mencapai 60 SKS, padahal kan S1 itu 140-150 SKS, itu kan berarti tinggal sekitar 80-90 SKS. Kalau 80 SKS maka kompetensi utama sangat disanksikan. Ini yang perlu mendapat kajian yang komprehensif dari Kemendikbudristek,” ungkap Fikri

Komisi X: Program MBKM Diterima Baik, Namun Catatan Harus Jadi Perhatian

saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/4).

“Belajar 3 semester di luar prodi, perlu didetailkan sehingga tidak merusak kompetensi utama atau *major competence*. Kalau kemudian nanti menjadi *minor competence* memang bebas, namun harus terukur karena ada yang mengambil mata kuliah lain yang di luar prodi tetapi di perguruan tingginya sendiri mengalami kesulitan

ketika dikonversikan menjadi SKS,” ungkap Fikri.

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan bahwa perlu kesamaan pandangan baik dari Kemendikbudristek hingga perguruan tinggi, sehingga hal teknis ini bisa dicarikan solusinya, karena sesungguhnya program MBKM ini sudah diterima dengan baik namun catatan-catatan yang ada harus menjadi perhatian.

“Kemendikbudristek juga harus melakukan sosialisasi pelaksanaan Program MBKM secara detail, jelas, sederhana dan berkelanjutan sehingga kebijakan ini bisa dipahami dari tingkat konsep sampai dengan teknis pelaksanaan. Konsep MBKM ini yang dikembangkan Kemendikbudristek bisa menjadi pedoman penting untuk membangun sumber daya manusia (SDM) handal, yang sudah tertuang dalam Rencana Strategis Kemendikbudristek tahun 2020-2024,” tandas legislator dapil Jateng IX itu.

Sebagaimana diketahui, Komisi X DPR RI telah membentuk Panja Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yang saat ini masih terus bekerja menerima masukan dari berbagai pihak. Hasil Panja ini, kemudian akan menjadi rekomendasi Komisi X DPR RI terkait Program MBKM ini, yang kemudian akan diserahkan langsung kepada Mendikbudristek RI. ■ skr/sf

Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Abdul Fikri Faqih. Foto: Singgih/nvl





Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI meninjau Teras 1 Malioboro, di Kota Yogyakarta. Foto: Andri/nvl

Berhasil Pindahkan PKL Malioboro, Komisi X Apresiasi Pemkot Yogyakarta

Relokasi dan penataan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro ke Teras Malioboro 1 dan 2 yang tidak menimbulkan masalah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendapat apresiasi dari Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira. Ia mengapresiasi relokasi pedagang yang semula berada di emperan Malioboro ke tempat yang lebih layak dan bagus untuk pengunjung.

“Dari kunjungan ke Teras 1, saya sempat berdiskusi dengan para penjual. Para pedagang mereka merasa lebih

nyaman di tempat yang baru dan mereka merasa tidak tergesur tapi mereka berpindah dengan sukarela dan mereka menemukan tempat yang lebih baik,” kata Andreas Hugo Pareira saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI meninjau Teras 1 Malioboro, di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (18/4).

Lebih lanjut Andreas menerangkan bagaimana model pemindahan PKL seperti ini juga bisa menjadi contoh untuk daerah yang lain. Karena menurutnya banyak daerah yang sampai sekarang tidak berhasil dalam

memindahkan PKL dari satu lokasi yang ke lokasi yang lain dan seringkali menimbulkan konflik di antara PKL dengan Satpol PP. Sehingga kemudian ini dapat menimbulkan persoalan persoalan konflik dan menggagalkan proses pemindahan tersebut.

Politisi PDI-Perjuangan ini menginginkan hal tersebut bisa menjadi *role model* bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemerintah daerah untuk mendukung program penataan PKL seperti di Yogyakarta, sehingga baik untuk tata kota dan menguntungkan untuk pedagang maupun pembeli. Termasuk untuk kenyamanan untuk pelaku pariwisata dan wisatawan.

Diketahui sekitar 1.800 PKL di sepanjang Malioboro menempati dua lokasi yakni di Teras Malioboro 1 dengan kapasitas 800 pedagang dan di Teras Malioboro 2 dengan kapasitas 1.040 pedagang. “Jadi para pedagang tidak dipindah keluar kawasan Malioboro. Tetap di Malioboro hanya dikumpulkan di dua tempat, tidak lagi menyebar sepanjang pedestrian,” imbuh legislator dapil NTT I itu. ■ man/sf

Komisi XI Soroti Pelaksanaan Program PEN di Kaltim

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menyoroti pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur yang tengah dilakukan mitra kerja Komisi XI DPR RI untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Saat ini, jelas Fathan, selain sebagai upaya untuk melakukan penyelamatan sektor kesehatan dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, vaksinasi, dan pengendalian pandemi, pemerintah juga tengah memfokuskan program PEN terhadap pemulihan perekonomian nasional khususnya UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

“Selain penanganan untuk kesehatan pemerintah juga menjalankan program pen sebagai respon atas masyarakat yang terdampak pada ekonominya khususnya sektor informal atau UMKM,” ungkap Fathan saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja, di Balikpapan, Kaltim, Senin (18/4).

Untuk itu, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, Komisi XI DPR RI berupaya mendapatkan informasi dan gambaran pelaksanaan tugas mengenai pelaksanaan program PEN oleh mitra kerja, khususnya dalam upaya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur pasca pandemi Covid-19.

“Pada kesempatan ini kami ingin memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan beserta



Foto bersama Tim Kunker Reses Komisi XI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Kaltim. Foto: Rizki/nvl



PENYELAMATAN SEKTOR KESEHATAN DENGAN FOKUS PADA BELANJA UNTUK KESEHATAN, VAKSINASI, DAN PENGENDALIAN PANDEMI

dari Kementerian Keuangan dan Bank Himbara, lalu PT Askrindo dan PT Jamkrindo dalam melaksanakan kebijakan PEN dan implementasinya di Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator-indikatornya,” imbuh Fathan.

Berdasarkan laporan perekonomian didapat Komisi XI DPR RI pada Februari tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Kaltim diprediksi akan terus memperlihatkan proses pemulihan,

dengan perkiraan pertumbuhan pada rentang 2,95-3,75 persen (yoy). Senada, seluruh mitra kerja Komisi XI DPR RI yang hadir dalam kesempatan itu juga menyampaikan rangkaian program PEN dalam rangka pemulihan sektor ekonomi dan UMKM pasca pandemi Covid-19 yang diimplementasikan oleh masing-masing instansi di Kaltim telah berjalan dengan baik.

Terkait hal tersebut, Fathan mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi, tidak dijadikan alasan untuk melupakan masalah utama yang terjadi akibat pandemi Covid-19 yaitu kemiskinan dan pengangguran yang belum teratasi hingga kini. “Yang pasti bahwa tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi yang bagus kalau pengangguran dan kemiskinan yang merupakan isu besar yang harus kita tuntaskan belum dapat teratasi, ini menjadi tantangan kita bersama,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II itu. ■ rr/sf

Komisi XI Nilai Inflasi Sulsel Masih Terkendali



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara memimpin Tim Kunker Komisi XI DPR RI ke Sulsel. Foto: Sofyan/nvl

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 tercatat 4,65 persen (year of year), tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, sebesar 3,69 persen. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu di Sulsel secara umum di atas rata-rata nasional. Namun ia mengakui, di tengah pergerakan masyarakat yang semakin dilonggarkan di tengah pandemi dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sulsel akan berdampak pada meningkatnya angka inflasi.

“Sehingga kalau inflasi di Sulsel ini tumbuh di atas rata-rata nasional, atau tumbuh di tahun sebelumnya, masih dalam kendali di APBN kita di 3±1 persen. Saya kira apa yang terjadi di Sulsel ini gambaran bahwa

memang pergerakan ekonomi Sulsel ini tumbuh dan hidup. Sehingga inflasi ada kenaikan dibanding tahun 2020,” kata Amir usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja guna memantau pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi Sulsel, di Kota Makassar, Sulsel, Senin (18/4).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, terkendalnya inflasi di Sulsel karena peran aktif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten/kota. “Juga ada kerja sama dan koordinasi yang terus dilakukan cukup bagus, itu juga salah satu penyebab terkendalnya inflasi di Sulawesi Selatan karena komoditas yang ada di daerah lain. Kalau di daerah lain komoditas terbatas supplainya bisa cepat oleh daerah. Ini

bagian dari koordinasi yang dibangun oleh TPID Sulawesi Selatan, dan saya kira ini juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengendalian inflasi di Sulsel selama ini,” tandas Amir lebih lanjut.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Amir mengakui sektor pertanian memberi kontribusi cukup tinggi. “Kalau pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memberikan perhatian yang serius melalui anggaran ke sektor pertanian pasti akan berpengaruh secara signifikan. Kalau tidak salah sekitar 40 persen sektor pertanian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau itu digenjut pasti pengaruhnya akan signifikan. Jadi kalau pemerintah pusat dan daerah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, tentu melalui sektor pertanian,” tandas legislator dapil Sulsel I itu.

Diketahui kinerja ekonomi Sulsel pada triwulan IV 2021 menunjukkan adanya pemulihan dengan tumbuh di angka 7,89 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,25 persen (yoy). Sementara inflasi Sulsel secara keseluruhan tahun 2021 tercatat sebesar 2,40 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2,04 persen (yoy). Dengan melihat kondisi saat ini, ekonomi Sulsel pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dengan rentang 4,9-5,7 persen (yoy).

Turut hadir, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) Dwi Pranoto, Deputi Komisiner Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Moch Ihsanuddin, Sestama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto, serta perwakilan Himpunan Bank Milik Negara/ Himbara (Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara), Jamkrindo Sulawesi Selatan, Askkrindo Sulawesi Selatan, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. ■ sf

Himbara Diminta Optimalkan Potensi Kredit UMKM

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus menyatakan pemberian kredit oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN harus bisa melihat distribusinya, sehingga penerima kredit itu memang benar-benar merata menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Dimana semua debitur seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa mendapatkan porsi signifikan untuk mengembangkan bisnisnya.

Menurutnya, kondisi terkini baik itu pengumpulan dana maupun pemberian kredit oleh Himbara di Kepulauan Riau sudah cukup baik. Hal itu terlihat dari penerimaan profit yang cukup baik, dan itu mengindikasikan adanya pertumbuhan kredit di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Namun demikian, Sihar melihat adanya potensi yang cukup besar agar penyerapan kredit kepada UMKM di wilayah tersebut dapat lebih optimal, dan ini menurutnya memerlukan upaya distribusi yang benar-benar terukur dan tepat.

“Sehingga kita akan melihat nanti UMKM mana yang berpotensi menjadi *champion*, menjadi unggulan. Dengan demikian, kita bisa tahu sektor mana yang memang nanti bisa kita dorong untuk berkembang, sehingga ini akan memberikan penguatan di papan tengah di struktur perekonomian kita,” kata Sihar usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak

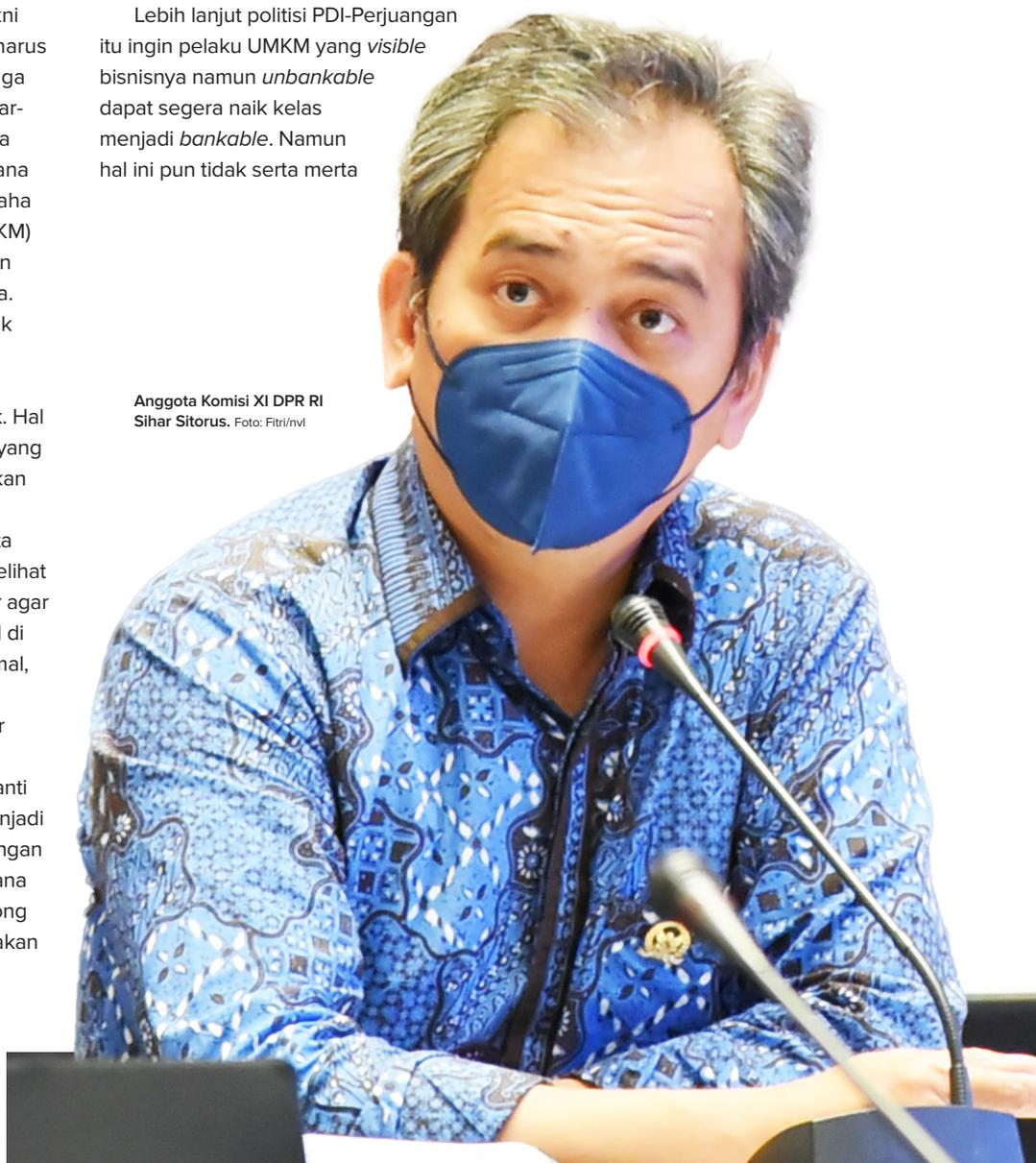
Kementerian Keuangan, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jajaran Himbara dan mitra kerja terkait, di Batam, Kepri, Senin (18/4).

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan itu ingin pelaku UMKM yang *visible* bisnisnya namun *unbankable* dapat segera naik kelas menjadi *bankable*. Namun hal ini pun tidak serta merta

dilakukan secara instan. “Tentunya disini perlu bantuan semacam literasi tentang produk perbankan, literasi digital, literasi bisnis,” jelasnya.

Tak hanya itu, Sihar juga turut mengimbau Himbara untuk terus mendekati kepada pelaku ekonomi seperti UMKM. “Mereka juga *confident*, nyaman datang ke Himbara meski tujuannya untuk kredit, sehingga mereka jadi tahu produk perbankan itu apa saja dan mereka bisa pakai untuk mengembangkan bisnisnya,” tutup Legislator dapil Sumatera Utara II itu. ■ *srw/sf*

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus. Foto: Fitri/nvl



Fadli Zon Tekankan Pentingnya Peran Indonesia dalam Penyelesaian Kasus di Myanmar



Foto bersama BKSAP DPR RI dengan Head of Mission, British Embassy Yangon Pete Vowles. Foto: Runi/nvl

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan pentingnya peran Indonesia dalam kemajuan penyelesaian kasus di Myanmar, apalagi mengingat pada tahun 2023 mendatang Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN. Ia juga menyampaikan untuk semua pihak yang terlibat untuk segera duduk bersama menyelesaikan persoalan di Myanmar sehingga terjadi kestabilan di Myanmar.

“Kita menerima *Head of Mission*, Kedutaan Inggris untuk Myanmar yang kebetulan datang ke Jakarta. Mereka

melihat bahwa DPR RI, dalam hal ini BKSAP sangat *concern* dengan isu Myanmar. Dan termasuk yang cukup aktif dalam melakukan *engagement*



PENYELAMATAN SEKTOR KESEHATAN DENGAN FOKUS PADA BELANJA UNTUK KESEHATAN, VAKSINASI, DAN PENGENDALIAN PANDEMI

dalam persoalan Myanmar sejak isu tentang Pengungsi Rohingya yang sekarang jumlahnya sudah satu juta lebih,” sebut Fadli Zon saat menerima *Head of Mission, British Embassy Yangon Pete Vowles*, di Ruang Rapat Delegasi, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, sejak kudeta militer tahun lalu terjadi di Myanmar, Indonesia merupakan negara paling awal menyatakan kecaman dan mengutuk kudeta tersebut. Dan menganggapi hal tersebut merupakan satu langkah mundur dari demokrasi. Fadli menambahkan, pihaknya juga melakukan *engagement* dan diskusi dengan *Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH)*.

“Jadi mereka sekarang mempunyai parlemen di pengasingan, dan juga ada pemerintahan yang juga berada di pengasingan. Kita sangat mendukung bahwa semua pihak yang terlibat di sini baik itu militer, junta militer, CRPH, NUG, dan juga pihak dari Aung San Suu Kyi bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan di Myanmar, sehingga terjadi kestabilan di sana. Dan tidak merugikan juga negara-negara di kawasan ASEAN,” tegas legislator dapil Jawa Barat V ini.

Dalam pertemuan ini, Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga mengatakan, BKSAP juga membahas mengenai langkah-langkah apa yang akan diambil setelah satu tahun lalu delegasi ASEAN dan Pimpinan Junta Militer Myanmar datang ke konferensi di Jakarta dan melahirkan lima poin konsensus.

“Dari 5 poin konsensus itu kita belum lihat sekarang ini langkah-langkah nyata dari junta militer sendiri, kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam 5 poin konsensus tersebut. Sehingga kita melihat presidensi atau keketuaan Indonesia di ASEAN nanti itu menjadi sangat lebih penting lagi, untuk mengangkat isu ini mengirim *special envoy*, sehingga ada kemajuan di dalam penyelesaian kasus di Myanmar,” tutup Fadli. ■ *wesf*



Setjen DPR Dukung Dharma Wanita Tebar Manfaat Melalui Santunan Anak Yatim

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mendukung pelaksanaan kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPR RI untuk terus menebar kebermanfaatannya seperti menyantuni anak yatim. Menurutnya, hal itu menjadi pedoman bersama untuk peduli dengan sesama. Terlebih, saat ini banyak masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

“Mereka (anak yatim piatu) juga tahun ini cukup banyak yang mengundang. Jadi tentu walau Dharma Wanita dengan segala keterbatasan dana yang ada bisa menghadirkan anak yatim luar biasa banyak,” ujar Indra usai acara Santunan Anak Yatim oleh DWP Setjen DPR RI, di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4).

Indra mengaku bersyukur di pertengahan Ramadan ini DWP Setjen DPR RI mengambil inisiatif untuk melakukan kegiatan sosial berupa santunan bagi anak yatim. Terlebih, kegiatan yang biasanya rutin dilakukan setiap tahun ini sempat terhenti ketika pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan acara atau perkumpulan karena pembatasan aktivitas.

“Sehingga tentu kegiatan untuk berbagi kepedulian sesama terhadap yang kurang mampu menjadi tradisi yang baik. Dan kita berharap, ini



Sekretaris DPR RI Indra Iskandar saat memberi santunan kepada anak yatim. Foto: Munchen/nvt

akan terus dilakukan setiap tahun. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di waktu waktu lain yang juga dimungkinkan,” harap Indra.

Senada dengan itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Setjen DPR RI Tanti Setyanta Nugraha juga menjelaskan bahwa DWP Setjen DPR RI ini adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial. Selain itu, kegiatan yang dilakukan DWP Setjen DPR RI pun beragam dan tidak terbatas pada pemberian santunan.

“Jadi salah satu kegiatannya di bidang sosial, seperti dengan memberikan santunan pada anak yatim. Anak yatim ini biasanya kita fokuskan

pada keluarga pegawai DPR RI, sesudah itu baru kita keluar. Kemudian kita juga mengunjungi yang sakit, memberikan bantuan pada yang sakit dan sebagainya,” terang Tanti.

Tanti pun menjelaskan, kegiatan santunan pada tahun-tahun sebelum adanya pandemi cukup beragam dan berbeda dengan tahun ini, di antaranya seperti mengundang anak-anak tingkat TK untuk berkeliling Kompleks Parlemen, mengenalkan anak-anak TK mengenai DPR, berbagai lomba seperti lomba tumpeng, hingga paduan suara DWP dan juga lomba memasak.

“Tahun ini *dikumpulin*, tanpa ada (kegiatan) apa-apa *nih*. Tapi kalau tahun-

tahun sebelumnya kan kita ada acara yang lain. Misalnya kita mengundang anak-anak TK untuk keliling DPR, mengenalkan mengenai DPR. Ya senang saja mereka. Jadi tidak melulu santunan di bidang sosial, kegiatannya banyak,” lanjutnya.

Di akhir, Tanti berharap DWP Setjen DPR RI dapat terus menyelenggarakan kegiatan serupa ke depannya, bahkan perlu ditingkatkan. Menurutnya, apa yang dilakukan DWP Setjen DPR RI dapat membantu menyejahterakan anggota. “Dan ke depan, kalau pandemi sudah tidak ada Insya Allah kita bisa lebih variatif seperti dulu,” pungkas Tanti lebih lanjut. ■ hal/sf

BK Tandatangani Perpanjangan Nota Kesepahaman dengan IAIN Syekh Nurjati

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BK DPR RI dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Diketahui, penandatanganan kali ini merupakan perpanjangan kemitraan BK DPR RI dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

“Yang paling mendasar (tujuannya) memperkuat kemitraan. Jadi kita sudah

5 tahun menjadi mitra, lalu ternyata ada manfaatnya baik di IAN Syekh Nurjati maupun di Badan Keahlian, karena secara proses ada RUU yang sekarang jadi undang-undang yang sah. Saya kira itu yang paling mendasar,” jelasnya, usai penandatanganan nota kesepahaman di Aula Pertemuan Gedung IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat, Selasa (19/4).

Selain penandatanganan nota kesepahaman, dalam kesempatan itu juga digelar *Focus Group Discussion*

(FGD) dengan tema “Arah Kebijakan Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional”.

Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul mengatakan, perpanjangan nota kesepahaman antara BK DPR RI dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai bentuk perwujudan *meaningful participation* yakni asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan bermakna.

“Yang kedua, ke depannya (kemitraan ini) dapat memperluas partisipasi publik, bagaimana diamanatkan oleh undang-undang baru nanti. Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) mengingatkan kita untuk *meaningful participation* dan menurut kami salah satunya adalah partisipasi yang diwakili oleh para akademisi dari perguruan tinggi. Jadi saya kira seperti itu yang kemudian tentunya lagi-lagi bahwa tentunya partisipasi ini tidak hanya dalam bentuk partisipasi saja, namun berkualitas. SK pendidikannya dan RUU yang sudah kami siapkan dan juga kita sampaikan kepada AKD yang menugaskan kita,” jelas Sensi. ■ mri/sf



Kepala BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul foto bersama usai penandatanganan nota kesepahaman dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Foto: Tari/nvl



Antusiasme ASN Sukseskan MTQ Korpri Setjen DPR RI



Foto bersama Panitia MTQ Korpri Setjen DPR RI. Foto: Gerald/nvt

Ketua Korps Pegawai Negeri (KORPRI) Sekretariat Jenderal DPR RI Djaka Dwi Winarko bersyukur dan mengapresiasi antusiasme Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Setjen DPR RI dalam penyelenggaraan ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Setjen DPR RI. Bekerja sama dengan DKM Masjid Baitirrahman, KORPRI melaksanakan lomba seperti Tartil, Kaligrafi, Ceramah dan Azan.

"Kami merasa bersyukur acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan terbilang sukses. Itu terlihat dari antusiasme pegawai dalam mengikuti lomba MTQ ini. Sebanyak 94 peserta hadir, itupun karena dibatasi. Mungkin kalau tidak dibatasi, bisa lebih banyak lagi," ujar Djaka usai penutupan dan pengumuman pemenang MTQ Korpri Setjen DPR RI di Masjid Baiturrahman

DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).

Dijelaskan Djaka, salah satu tujuan dari penyelenggaraan ini tidak lain adalah ingin memberikan forum, memberikan fasilitas, serta tempat untuk mengekspresikan teman-teman dalam belajar memahami Al-Qur'an. Dimana basis dari semua kehidupan ini ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an



**BAHWA SEJATINYA
DALAM HARI-HARI DI
LUAR RAMADAN PUN
KORPRI DPR RI RUTIN
MENGKELAR BERBAGAI
KEGIATAN KEAGAMAAN,
KAJIAN DAN PENGAJIAN**

ini yang diterjemahkan dalam bentuk bacaan yang baik dengan tartil, dibuat lukisan yang baik dalam bentuk kaligrafi, serta yang diterangkan dalam bentuk ceramah.

Lebih lanjut Kepala Pusat Teknologi Informasi DPR RI ini mengungkapkan bahwa sejatinya dalam hari-hari di luar Ramadan pun KORPRI DPR RI rutin menggelar berbagai kegiatan keagamaan, kajian dan pengajian. Sehingga bisa dikatakan ajang MTQ ini sebagai "puncak" pelatihan selama ini dalam mengenal dan memperdalam Kitab Suci Al-Qur'an.

Meski demikian pihaknya tidak ingin ajang ini hanya sebatas selesai di formalitas lomba MTQ saja, dan tanpa ada kelanjutan. Ia berharap setelah ini, dalam kehidupan sehari-hari hingga bertemu dalam Ramadan berikutnya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, baik di kehidupan *social* kita, maupun dengan teman sejawat.

"Yang lebih penting lagi bagaimana kita mengisi kehidupan sampai Ramadan berikutnya lagi. Kita tidak ingin menjadi bagian dari umat yang merugi, bahwa hari ini tidak lebih baik dari kemarin, bahwa hari esok tidak lebih baik dari hari ini," pungkasnya.

Adapun dalam lomba MTQ tersebut keluar sebagai pemenang pertama Tartil Qur'an Putra, Rahmat Kamaruddin, serta Raihan Ulusuyur sebagai pemenang terbaik pertama Tartil Qur'an putri. Sedangkan dai terbaik, pertama dimenangkan oleh Lasmandi Iswondo, dan berikutnya daiyah terbaik direbut oleh Rastri Paramitha.

Sementara pemenang azan terbaik pertama dimenangkan oleh Muhammad Basiludin, dan Anto Gusnanto sebagai pemenang lomba doa terbaik pertama putra, dan Ade Nurul Aida sebagai pemenang lomba doa terbaik pertama putri, serta Abdul Cholid sebagai pemenang pertama lomba kaligrafi KORPRI Setjen DPR RI. Juga tentunya berbagai pemenang lainnya di berbagai kategori tersebut.

■ ayu/aha

Baksos dan Bazar PIA DPR Berlangsung Meriah



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani bersama Ketua PIA DPR RI Tri Hatmanti Utut Adianto (kanan) saat pembukaan Bakti Sosial dan Bazar PIA DPR RI. Foto: Runi/nvi

Tak ada kata lelah dan jenuh untuk berbuat baik bagi sesama. Hal itulah yang menjadi prinsip dasar isteri-isteri anggota DPR RI yang tergabung dalam Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam bulan suci Ramadan tahun ini, PIA DPR RI kembali menggelar acara bakti sosial.

Dalam baksos yang mengambil tema “Perempuan Berbagai di Bulan Penuh Berkah, Ramadan”, PIA DPR RI di bawah pimpinan Ketua PIA DPR RI Tri Hatmanti Utut Adianto ini membagikan lebih dari dua ribu paket sembako kepada berbagai pihak yang selama ini secara tidak langsung ikut membantu Anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugas negara, seperti petugas kebersihan,

pramusaji dan petugas keamanan atau pengamanan dalam.

Diungkapkan Tri Hatmanti, khusus tahun ini ada yang berbeda dari baksos PIA DPR, dimana juga digelar bazar. Dalam bazar yang menampilkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari ini diikuti oleh 106 para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta beberapa wiraswasta dan pengusaha lokal lainnya.

“Tujuan utama bazaar ini tidak lain adalah untuk membangkitkan lagi UMKM dan para pelaku usaha kecil lainnya, setelah selama dua tahun terkena dampak pandemi Covid-19,” ujar Tri Hatmanti Utut Adianto usai pembukaan Bakti Sosial dan Bazar PIA DPR RI, di selasar Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4).

Dalam acara yang dibuka secara langsung Ketua DPR RI Puan Maharani itu, secara spesial juga menampilkan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan yang pernah berkiprah sebagai artis dan diva pop tanah air, Krisdayanti. Tidak ketinggalan politisi Partai Gerindra yang juga sebagai artis dengan suara emasnya, Mulan Jameela, ikut memeriahkan acara Baksos dan Bazar PIA DPR RI, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan (prokes). Makin meriah dengan kehadiran Anggota DPRD DKI Jakarta dan artis, Tina Toon.

Alhasil, diharapkan acara yang digagas oleh ketua pelaksana, Nita Jhon Kenedy Aziz ini bisa sedikit membantu sesama dalam menyambut Hari Raya Idulfitri, sekaligus ikut meningkatkan ekonomi kerakyatan. ■ ayu/sf



**SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

MENGUCAPKAN :

SELAMAT HARI BURUH

1 MEI 2022





**SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

MENGUCAPKAN :

*Selamat Hari Raya
Idulfetri 1443 H*

Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin

